

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Konsep Negara kesejahteraan memiliki kewajiban yaitu dalam rangka kegiatan pelayanan pada kebutuhan setiap warga Indonesia atas kebutuhan dasarnya. Negara Indonesia memiliki suatu kewajiban dalam menangani penyediaan tentang pelayanan publik hal itu adalah amanat dari Undang-Undang Dasar 1945. Pentingnya membangun rasa percaya masyarakat terhadap kinerja negara terutama atas pelayanan publik yang dilakukan oleh lembaga pemerintah negara Indonesia sebagai pelaku utama penyelenggara pelayanan publik. Kebijakan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik harus bersumber pada Pancasila dan UUD 1945. Diketahui secara teoritis kebijakan penyelenggaraan pelayanan publik menurut Ilmu Administrasi Publik pada paradigma new public service adalah pelayanan publik yang bersifat responsif atas berbagai kepentingan serta nilai hidup yang terpelihara dalam kehidupan setiap warga negara dan juga mempunyai sifat non diskriptif serta demokratis untuk menjamin persamaan di setiap kalangan masyarakat, tanpa adanya perbedaan suku, ras, etnik agama dan latar belakang setiap golongan. Tugas terpenting Pemerintah yaitu melakukan pokok-pokok negosiasi dan melakukan elaborasi untuk setiap kepentingan di masyarakat dan setiap kelompok komunitas. Mengetahui masyarakat yang memiliki sifat dinamis seharusnya karakter dari pelayanan publik untuk selalu mengikuti perubahan terhadap perkembangan di antara warga negara. Hal tersebut menunjukkan bahwa setiap warga negara Indonesia harus

diperlakukan dengan kualitas hak yang sama nilainya pada saat menghadapi sistem birokrasi publik dalam rangka menerima hak yang mutlak yaitu pelayanan selama setiap syarat yang dibutuhkan telah terpenuhi. Nilai-nilai tentang hal impersonal yang terbebas dari primodialisme dan nepotisme yang akan memberi sumber inspirasi pemerintah dalam rangka melaksanakan regulasi, pengaturam dan kebijakan pada penyelenggaraan pelayanan publik.

Pelaksanaan kebijakan yang bermasalah serta latar belakang yang mengandung pengaruh pelaksanaan kebijakan tidak hanya terkait mekanisme tetapi lebih tepatnya perihal estimasi kebijaksanaan, prosedur yang dijalankan secara rutin, efektivitas sebuah teknik, manajemen sumber daya , keadaan kondusif antar unit organisasi serta golongan pada politik yang memungkinkan melakukan sifat tolak belakang terhadap suatu kebijaksanaan dimana hal tersebut telah ditetapkan maka melihat permasalahan tersebut jika pemerintah bertujuan memenuhi kebutuhan setiap warga negara, hal yang paling penting yaitu menciptakan pandangan bahwasannya pemerintah yang sejatinya memiliki peran uatam pelayan publik. Merujuk pada usaha Negara Indonesia sebagai negara yang sangat luas dengan wilayahnya serta sumber daya yang melimpah harus digunakan sebagaimana untuk kepentingan masyarakat terutama pada sumber daya Alam Pertanian melihat di Negara yang luas seperti Indonesia ini dan di juluki sebagai negara agraris memiliki potensi dan peluang serta hal yang diberkahi bagi penduduknya yaitu mempunyai pekerjaan pokok dari sektor pertanian. Seorang petani ketika memiliki lahan persawahan tentu saja sebagian besar akan memperkerjakan seorang buruh tani untuk bekerja di lahan pemilik

sawah, dalam tujuan sampai dengan kategori berhasil menjadikan masyarakat Negara Indonesia adil dan makmur yang terpenting melaksanakan tujuan dalam pemenuhan kebutuhan terutama hak dasar bagi setiap rakyat, negara berkewajiban mewujudkan pemberdayaan masyarakat, perlindungan, terutama bagi para pelaku pertanian yang terarah, tersusun rencana yang baik dan bersifat kontinu.

Dalam undang-undang tentang perlindungan dan pemberdayaan Petani tepatnya pada nomor 19 tahun 2013 yang bertujuan untuk memberi peningkatan pada taraf kesejahteraan dan kualitas di kehidupan para petani, mengetahui bahwa pertanian adalah sektor fundamental di Indonesia ini terbukti dengan adanya konsep dari negara Indonesia sebagai negara kesejahteraan dengan menjamin pendapatan minimum tiap individu ataupun keluarganya dalam rangka kebutuhan rakyat Indonesia agar bisa terpenuhi setelah itu hal yang penting pula dalam memberikan akses pelayanan sosial dasar seperti pendidikan, pemenuhan gizi, sanitasi dan air bersih.

Indonesia sebagai negara yang masih dalam taraf berusaha untuk sukses dipastikan telah memiliki strategi dalam menangani mengatasi permasalahan tersebut dari hilir sampai ke hulu, terutama petani dan buruh tani dan keluarga mereka yang rentan dengan keadaan ekonomi, kesehatan, sanitasi dan pelayanan sosial lainnya. Dalam hal yang penting pada konsideran UU No. 19 Tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan Petani bahwa keadaan yang terjadi adanya peningkatan perubahan iklim, risiko bahaya terhadap bencana alam dan risiko usaha, gejolak ekonomi global dan globalisasi, serta pentingnya pemberdayaan dan perlindungan karena sistem pasar yang tidak berpihak kepada

petani. Pada asas Perlindungan dan Pemberdayaan Petani disebutkan bahwasnya untuk menyelenggarakan asas tersebut diperlukan memperhatikan suara aspirasi para petani serta pemangku kepentingan dengan dibekali layanan informasi yang mudah untuk diakses dan digunakan oleh Masyarakat. Pemerintah Indonesia dalam mewujudkan kesejahteraan para petani dengan program subsidi input usaha tani yang antara lain terdapat dalam subsidi pupuk ataupun benih dan juga penerapan teknologi agar mampu meningkatkan kemampuan produktivitas usaha tani. Kegiatan usaha tani tidak akan pernah lepas dari permasalahan pemupukan maka melalui program Pemerintah dengan adanya subsidi pupuk diharapkan para petani mendapat keringanan terhadap mahalanya biaya pembelian pupuk , namun ketika program tersebut diimplementasikan kedalam masyarakat terdapat beberapa masalah antara lain kelangkaan pupuk bersubsidi dan petani yang seringkali membeli pupuk subsidi tanpa memikirkan kuota kebutuhan pupuk untuk usaha tani, sedangkan jumlah tersediaanya pupuk subsidi di pengecer/penjual terhitung rendah namun petani membeli pupuk subsidi melebihi dosis anjuran sehingga mengakibatkan tingginya harga jual pupuk , hal ini disebabkan karena ketidakmerataan distribusi yang tersistem dengan baik pada tingkat wilayah ataupun provinsi.

Permasalahan pendistribusian pupuk ini juga terjadi di Wilayah Jawa Tengah tepatnya di Kabupaten Rembang dalam upaya meningkatkan sumbu keberhasilan pertanian tetap mendapatkan problema karena daerah ini mempunyai potensi pertanian yang hampir semua wilayah daratannya didominasi dengan mata pencaharian sebagai seorang Petani data tersebut dapat dilihat pada tabel 1.1 :

Tabel 1.1**Luas Daerah Produksi Pertanian Kabupaten Rembang 2016**

Kecamatan		Luas Panen	Produksi	Produktivitas
		(Ha)	(Ton)	(Kw/Ha)
1	Sumber	3 179	4 179	5 179
2	Bulu	2 097	9 713	46,32
3	Gunem	1 544	7 433	48,14
4	Sale	3 650	18 513	50,72
5	Sarang	1 823	8 987	49,3
6	Sedan	2 834	13 161	46,44
7	Pamotan	3 502	16 862	48,15
8	Sulang	1 487	6 984	46,97
9	Kaliori	3 409	10 963	32,16
10	Rembang	1 636	7 391	45,18
11	Pancur	1 140	5 282	46,33
12	Kragan	2 339	11 269	48,18
13	Sluke	1 375	6 383	46,42
14	Lasem	1 165	5 550	47,64
Rembang		31 180	141 902	45,51

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Rembang 2017

Dilihat dari data tersebut luas produksi pertanian kabupaten Rembang di setiap kecamatan dengan mata pencahariannya adalah sebagai seorang Petani, untuk

menjaga kestabilan produksi Hal ini di buktikan berdasarkan PDB tahun 2017 pada sektor Bidang pertanian, kehutanan, dan perikanan menjadi sektor yang mengalami pertumbuhan paling tinggi pada Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia berdasarkan data lapangan usaha pada triwulan II tahun 2017. Badan Pusat Statistik (BPS) diketahui bahwa ketiga bidang itu mengalami kenaikan 9.93 persen yang didapatkan dari kuartal sebelumnya yang mana mengalahkan laju pertumbuhan jasa perusahaan yang tumbuh yaitu sekitar 3.37 persen menurut data Badan Pusat Statistik 2017

Kebutuhan pangan akan meningkat seiring dengan laju pertumbuhan penduduk , untuk itu perlunya meningkatkan produksi beras dan diperkirakan bahwa di tahun 2020 kebutuhan beras berjumlah 35,97 juta ton dengan adanya asumsi 137 Kg per tahun hal ini telah dianalisis dengan melihat faktor yang sangat berpengaruh dengan baik salah satunya yaitu input penggunaan pupuk yang baik dan teratur, namun pada kenyataannya yaitu diketahui Kabupaten Rembang sendiri dalam Realisasi penyaluran pupuk di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, pada tahun 2016 dalam tiga bulan pertama terbilang rendah karena haanya mencapai 12.712 ton atau 21,7% diambil dari alokasi pupuk 58.475 ton, hal ini sangat dikhawatirkan karena hampir memasuki musim kemarau. Data tersebut juga dapat dilihat pada tabel 1.2 :

Tabel 1.2

Jumlah Alokasi Pupuk Kabupaten Rembang 2016

No.	KECAMATAN	ALOKASI PUPUK (TON)				
		Urea	ZA	SP36	NPK	ORGANIK
1.	SUMBER	1.300	845	297	745	425
2.	BULU	2.300	735	416	1.110	725
3.	GUNEM	2.100	665	295	1.030	482
4.	SALE	1.825	245	280	1.325	660
5.	SARANG	2.975	649	791	1.636	825
6.	SEDAN	2.650	420	590	1.080	460
7.	PAMOTAN	1.600	1.625	320	1.265	798
8.	SULANG	1.600	1.425	353	824	605
9.	KALIORI	1.000	230	151	515	230
10.	REMBANG	900	295	185	615	500
11.	PANCUR	1.400	850	250	755	495
12.	KRAGAN	2.150	345	450	1.115	575
13.	SLUKE	1.800	105	411	800	690
14.	LASEM	600	91	61	170	130
Jumlah		24.20	8.525	4.850	12.985	7.600

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Rembang

tahun 2016

Berdasarkan Tabel 1.2 Kabupaten Rembang memiliki rata-rata alokasi pupuk padi dengan jumlah kurang dari 58,475 Ton per tahun, perhitungan sejak tahun lalu hingga tahun ini produksi padi terjadi adanya masalah fluktuasi yang disebabkan oleh faktor alam yaitu curah hujan yang cukup rendah sehingga realisasi tanam rendah di tahun 2016 pada Bulan Oktober sampai tahun 2017 Bulan Maret

terhitung 61% atau sama dengan 21.500 Ha. Permasalahan tersebut juga dipengaruhi adanya bentuk resiko-resiko seperti serangan penyakit tanaman dan serangan hama, pemupukan yang kurang tepat dan benih dasar dengan kualitas yang buruk. Hal ini membuktikan bahwa kegiatan usaha tani di Kabupaten Rembang memiliki banyak resiko usaha tani yang muncul ketika proses pra-panen atau proses budidaya sampai pada waktu pasca panen. Beberapa resiko dapat diketahui tingkatannya melalui standart deviasi dengan memberikan deskripsi resiko yang saat itu terjadi untuk mengantisipasi resiko yang akan terjadi pada kegiatan usaha tani lalu dipengaruhi pula dengan permasalahan keterlambatan penyaluran pupuk di Gudang Kabupaten Rembang Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yaitu telah menambah persediaan pupuk urea untuk Rembang, hal ini disebabkan adanya musim tanam padi yang bersamaan ini mengakibatkan gudang pupuk urea tidak sanggup melayami penebusan pupuk karena hanya terdapat1 (satu) lokasi sehingga membuat antrian yang cukup padat dan mengakibatkan pengiriman yang lambat. Hal ini dapat dianalisis dengan tepat untuk memberi solusi dalam kegiatan usaha tani. Pemerintah Kabupaten Rembang dalam upaya memangkas risiko tersebut telah memberlakukan adanya seruan dari Program yang telah diupayakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Upaya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk menagnani terkait permasalahan pupuk subsidi adalah menciptakan Program (*Kartan*) Kartu Tani.

✓ **Kartu Tani**

Kartu Tani sebagai alat transaksi yang berfungsi sebagaimana kartu debit ATM yang digunakan untuk membeli pupuk bersubsidi. Program Kartu Tani akan memudahkan petani dalam menerima saluran pupuk bersubsidi dan juga fasilitas kredit usaha rakyat lainnya. Dapat diketahui manfaat Kartu Tani bagi para petani yaitu didasarkan pada ketentuan pupuk bersubsidi yang tertuang *Permentan 67 Tahun 2016* dan *Permendag no 15 Tahun 2013* serta *Peraturan Daerah no 5 tahun 2016*, tentang perlindungan Petani serta pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi. *Kartu tani (Kartan)* dapat dikatakan sebagai media penyaluran bansos serta subsidi melalui kartu yang dikeluarkan lewat perbankan. Kartu Tani sebagai alat transaksi sehingga untuk mendapatkan kartu tersebut Pemerintah telah melakukan verifikasi data para calon pemegang kartunya, karena selama ini dengan Sistem Kartu Tani yang diberlakukan pada tahun 2017.

Kartu ini memiliki dasar hukum atau peraturan yaitu sebagai berikut :

1. Perpres (Peraturan Presiden) No. 77 Tahun 2005 yang diubah menjadi Perpres No.15 Tahun 2011 yaitu Pupuk Bersubsidi sebagai barang yang diawasi oleh Pemerintah.
2. Permentan (Peraturan Menteri) No. 69 Tahun 2016 yaitu mengatur tentang alokasi dan peraturan Harga Eceran Tertinggi pada sektor Pertanian Tahun 2017.
3. Peraturan Menteri Perdagangan No.15 Tahun 2013 yaitu mengatur tentang perihal perdagangan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi pada Sektor Pertanian.

Landasan Pelaksanaan Program Kartu Tani berdasarkan peraturan dari Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut :

1. Gubernur Jawa Tengah dan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah membentuk kerja sama dengan Bank BRI yaitu mengenai Kartu Tani diklaim dapat menjadi alat penebusan dan bayar pupuk bersubsidi bagi Petani terutama setiap petani di Jawa Tengah.
2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah membentuk keputusan tentang Petunjuk Teknis terkait penggunaan Kartu Tani dengan dibentuknya aplikasi SINPI (Sistem Informasi Manajemen Pangan Indonesia Provinsi Jawa Tengah.

✓ ***Tujuan Kartu tani :***

Mewujudkan sistem pendistribusian pupuk bersubsidi menganut pada Asas 6 Tepat yaitu tepat terhadap jumlah kuota pupuk yang seharusnya diterima petani, jenis pupuk yang tepat agar produksi pertanian berkualitas baik, tepat waktu pendistribusian pupuk agar produksi pertanian berjalan maksimal tanpa adanya keterlambatan, tepat tempat atau sasaran penerima pupuk subsidi, mutu yang terjamin dan harga sesuai eceran menurut peraturan yang berlaku serta pelaksanaan program layanan perbankan untuk petani di Jawa Tengah.

✓ ***Manfaat Kartu Tani :***

➤ Bagi Pemerintah

1. Database petani yang akan disajikan lebih akurat serta lebih terintegrasi;

2. Informasi tentang luas lahan kegiatan produksi pertanian dikepalai per komoditas setiap wilayah;
3. Perkiraan hasil panen didasari oleh Kebijakan;
4. Program Bantuan sosial dan program subsidi lainnya akan lebih tepat sasarannya ketika hendak disalurkan.

➤ Bagi Petani

1. Saprotan yang bersubsidi ataupun yang nonsubsidi akan dipastikan mudah tersedia;
2. Hasil dari penjualan pasca panen oleh off taker (tanpa melalui perantara) akan dimudahkan prosedurnya;
3. Pengadaan akses Pembiayaan (KUR);
4. Membangun kebiasaan untuk selalu tidak konsumtif (gemar menabung)
5. Biaya untuk simpanan menjadi lebih murah dan dirasa memudahkan;
6. Program Prona (BPN) menjadi mudah dipatkan;
7. Kemudahan untuk mendapatkan asupan subsidi dari Kemenkeu, Kementan, Kemenkop;
8. Bansos akan diterima dengan mudah dan tepat sasaran

➤ Bagi Pihak Ketiga

1. Kemudahan dalam mendapat Informasi tentang perkiraan jadwal untuk melakukan kegiatan panen (setiap komoditas dan penyebaran wilayah yang telah ditentukan);
2. Anggaran hasil panen akan disediakan;

3. Kemudahan dalam mendapat informasi tentang penyediaan gudang dan penanganan pasca panen;
4. Kemudahan dalam mendapat informasi tentang kebutuhan pupuk dan pembagian wilayahnya;
5. Sistem Distribusi pupuk akan akurat dan bisa mencapai 6 Tepat sesuai dengan tujuan Kartu Tani;
6. Manajemen stok dan perkiraan produksi pupuk mudah untuk dilakukan;
7. Kemudahan dalam kegiatan transaksi dan kegiatan pembayaran hasil dari panen kepada para petani dengan adanya sistem bayar yang telah modern dan terintegrasi.

Faktanya yang terjadi dilapangan adalah belum terwujudnya tujuan dan manfaat kartu tani tersebut dengan adanya beberapa masalah seperti kurang cermatnya validasi data kartu tani , terdapat kecurangan dalam pembelian pupuk subsidi menggunakan kartu tani , belum sanggupnya gudang pupuk dalam melayani penebusan pupuk serta sulitnya koordinasi dalam menerapkan program kartu tani antara petani , pemilik kios dan petugas penyuluh pertanian. Hal ini sangat berpengaruh ketika kartu tani tidak digunakan secara optimal maka tujuan dan bantuan sosial serta yang utama manfaat kartu tani dalam menstabilkan ketersediaan pupuk subsidi tidak dirasakan secara langsung oleh para petani.

Penerapan Program Kartu Tani berjalan sejak tahun 2017 yang dilaksanakan pada 35 Kabupaten Kota Jawa Tengah. Penyuluh Pertanian Sebagai ujung Tombak dalam pelaksanaan pendataan luas lahan per petani.

Tugas ini tidaklah mudah karena dilapangan pasti banyak ditemui persoalan-persoalan yang menghadang, hal tersebut menjadikan pentingnya kegiatan ini. Peran Kartu Tani dinilai penting karena melihat latar belakang bentuk demografi daerah Jawa Tengah dengan jumlah penduduk tinggal di pedesaan senilai 65% sebagai Petani dan Buruh Tani. Kabupaten Rembang sendiri memiliki Gabungan Kelompok Petani yang cukup banyak di beberapa kecamatan hal ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.3
Jumlah Gapoktan Kabupaten Rembang

No.	Kecamatan	Jumlah Poktan	Tergabung dalam Gapoktan	Prosentase (%)
1.	Bulu	93	76	81.72
2.	Gunem	84	67	79.76
3.	Kaliori	84	67	79.76
4.	Kragan	134	118	88.06
5.	Lasem	103	65	63.11
6.	Pamotan	85	79	92.94
7.	Pancur	81	73	90.12
8.	Rembang	116	89	76.72
9.	Sale	74	65	87.84
10.	Sarang	114	103	86.55
11.	Sedan	119	89	78.07
12.	Sluke	74	56	75.68
13.	Sulang	122	85	69.67
14.	Sumber	119	101	84.87
	Jumlah	1,402	1,133	

Sumber : SIMLUHTAN Tahun 2019

Selama ini petani telah mengalami kendala kelangkaan pupuk bersubsidi pada saat kegiatan masa pemupukan. Setelah dilakukan analisis, ternyata masalahnya adalah pendistribusian pupuk bersubsidi yang dijual terbuka, sehingga banyak terjadi penyimpangan, karenanya perlu perubahan sistem agar

pendistribusian pupuk bersubsidi dilakukan tertutup, dengan menggunakan kartu tani sesuai tujuan kartu tani mewujudkan distribusi pupuk bersubsidi disesuaikan dengan asas "**enam tepat**"

➤ Enam Tepat :

1. Ketetapan Jumlah
2. Ketetapan Jenis
3. Ketetapan Harga
4. Ketepatan Tempat/sasaran
5. Ketetapan Mutu
6. Ketetapan Waktu dan Informasi

Selain pendistribusian secara enam tepat diharapkan dapat serta adanya pemberian layanan perbankan bagi petani, dan yang paling penting adalah pendistribusian pupuk subsidi dapat dirasakan manfaatnya yang baik tanpa merugikan pihak manapun karena kartu tani membutuhkan data tiap anggota atau tiap petani menerima alokasi jatah pupuk yang telah tercantum pada sistem RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) sehingga kebutuhan pupuk setiap petani terjamin serta penjualan hasil usaha tani dan bantuan dana sosial dari Pemerintah tersalurkan dengan tepat. Kabupaten Rembang dalam kegiatan penjualan dan penyaluran pupuk bersubsidi yang mana telah diatur pada Peraturan Menteri Pertanian terkait aturan Harga Eceran Tertinggi dan Peraturan Menteri Perdagangan tentang penyaluran pupuk subsidi , dan juga dijelaskan bahwa beberapa PT.Pupuk di Kabupaten Rembang memberikan surat edaran pada kios binaan penjual dan penyalur/pengecer resmi pupuk subsidi dengan surat berisi

aturan yang ditetapkan. Pada aturan yang telah ditetapkan bahwa untuk memperlancar distribusi pupuk subsidi dibutuhkan validasi RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) yang harus sudah di validasi oleh Dinas Pertanian setempat dibantu dengan Penyuluh pertanian urusan program kartu tani. RDKK adalah dokumen utama yang digunakan sebagai dasar perhitungan jumlah pupuk yang , sehingga apabila prosedur pengiriman berjalan dengan baik maka seharusnya kelangkaan pupuk tidak pernah terjadi , Kartu tani digunakan untuk menebus dan membayar pupuk bersubsidi bagi petani di Provinsi Jawa Tengah.

Kabupaten Rembang telah berhasil merilis Kartu Tani pada Tahun 2017 dan tercatat sebagai penggunaan kartu tani pada sepuluh besar kabupaten gelombang ke-2 di Provinsi Jawa Tengah , namun pada pelaksanaannya terdapat permasalahan yang muncul dilapangan. Diantaranya para petani di Kecamatan Rembang yang sudah menjadi Gabungan kelompok petani namun Dintapan Kabupaten Rembang belum bisa membagikan Kartu tani secara tuntas, masih terdapat data yang menunjukkan bahwa tidak 100% pembagian kartu tani sampai kepada semua petani karena masih banyak petani yang termasuk golongan Petani tua dan beberapa dari lainnya kurang bisa mengoperasikan Teknologi serta tidak dapat ditemui ketika kartu tani hendak dibagikan sedagkan aturan yang tepat Kartu ini harus diterapkan pada prosedur tetap pemberian kartu tani oleh Bank BRI.

Kartu Tani bukan hanya sekedar yang dijalankan namun demi suksesnya program kartu tani di wilayah Kecamatan Rembang kabupaten bagi semua

pegawai penyuluh pertanian lapangan (PPL) dan pegawai BRI yang telah ditugaskan sebagai penganggung jawab penyaluran Kartu Tani. diminta melakukan operasi ke lapangan. Tak hanya PPL saja namun Kepala Desa dan perangkat desa juga sangat penting untuk ikut mengawal kartu tani pada Gerakan Serentak Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Rembang. Maka hal itu akan disayangkan ketika kegiatan ini tidak dilakukan dari semua sektor yang menyangkut produk Kartu Tani. Kartu Tani yang dilaksanakan di Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang belum mampu mewujudkan pendistribusian pupuk bersubsidi yang ber-asis 6 tepat karena masih mengalami keterlambatan pendistribusian pupuk dan kelangkaan pupuk subsidi serta program pemberian layanan perbankan untuk tiap petani belum dapat dirasakan langsung oleh Petani di Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang. Merujuk pada penjelasan diatas dapat ditemukan Pertanyaan Penelitian yaitu Mengapa Kartu Tani belum konsisten dengan spesifikasi desain program dan menunjukkan kinerja sesuai dengan tujuannya dalam memenuhi kebutuhan kelompok petani di Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang.

1.2 Perumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

1. Kebijakan Pemerintah tentang pengadaan pupuk bersubsidi mempengaruhi pelaksanaan distribusi yang mengakibatkan adanya sistem pendistribusian terbuka hal ini memberikan dampak buruk yaitu kelangkaan pupuk bersubsidi karena belum terdapat program yang mampu menerapkan tujuan

Distribusi Pupuk yaitu 6T serta belum terdapat Program petani untuk memberikan keuntungan lebih dalam melakukan usaha tani.

2. Dinas Pertanian dan Ketahanan pangan Kabupaten Rembang melalui Balai Penyuluh pertanian dalam melaksanakan Program Kartu Tani dimulai dari pendataan kepemilikan lahan setiap kelompok petani sehingga sasaran pengguna kartu tani tepat dengan tujuan Kartu tani namun diantaranya Penyuluh pertanian tidak dapat membagikan kartu tani kepada para petani yang sudah menjadi Gabungan kelompok petani Kecamatan Rembang.
3. Pelaksanaan Program Kartu Tani di Kecamatan Rembang masih memiliki beberapa kendala seperti tidak konsistennya prosedur pembelian pupuk bersubsidi oleh pengecer dan hal ini menimbulkan tindak kecurangan dan diperlukannya monitoring berkala mengenai pelaksanaan Kartu Tani.

1.2.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Efektivitas Program Kartu Tani di Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang ?
2. Apa faktor-faktor penghambat Efektivitas Program Kartu Tani di Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dalam rumusan masalah yang dituliskan diatas, maka penulis memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis Efektivitas Program Kartu Tani di Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang.
2. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat Efektivitas Program Kartu Tani di Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

1.4.1 Secara Teoritis

- a) Hasil penelitian ini diharapkan mampu dijadikan sebagai manfaat dalam perihal pengembangan ilmu Administrasi Publik sebagai sumber referensi atau bacaan yang bisa menambahkan informasi secara teori dan secara empirik kepada peneliti atau pihak yang hendak melaksanakan penelitian lebih dalam tentang program atau seperti permasalahan ini, dan memberikan tambahan sumber daftar referensi.
- b) Bagi peneliti, hasil penelitian ini mampu menjadi pembanding diantara ilmu yang diperoleh ketika menjalankan perkuliahan dengan kenyataan atau realita yang berlangsung ditengah-tengah kehidupan Masyarakat maka dapat menjadi bekal ketika hendak turun lapangan melakukan penelitian.
- c) Penelitian ini merupakan pengembangan berbagai teori diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa konsep pengembangan studi manajemen

publik yang dikaitan dengan efektivitas program Kartu Tani di Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang.

1.4.2 Secara Praktis

a) Bagi Pelaku Pertanian

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber informasi bagi pelaku Pertanian di Kabupaten Rembang dalam strategi penerapan efektivitas program kartu tani.

b) Bagi Peneliti

Hasil penelitian diharapkan memberi informasi yang penting dan memberi dampak yang baik sebagai pengalaman menerapkan ilmu dalam kegiatan perkuliahan serta memberi informasi tambahan kepada peneliti yang akan melakukan penelitian serupa.

1.5 Landasan Teori

1.5.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian ilmu pengetahuan yang dilakukan oleh para peneliti akan menghasilkan ilmu pengetahuan yang dapat diandalkan dan dipertanggung jawabkan sesuai dengan fakta yang empiris dan sistematis yang telah ditemukan. Tujuan dilakukannya penelitian terdahulu adalah acuan peneliti untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang sedang menjadi objek penelitian. Penelitian terdahulu dilakukan dengan pemetaan jurnal ilmu pengetahuan yang terdiri dari judul, nama peneliti, variabel dan indikator, tujuan penelitian yang serta hasil penelitian ada satu sama lain

agar menghasilkan cara pandang baru terhadap ilmu pengetahuan. Penelitian terdahulu yang dikaji difokuskan pada penelitian yang berkaitan dengan penelitian tentang Efektivitas Program Kartu Tani dalam menangani masalah pendistribusian pupuk bersubsidi dan manfaat Kartu Tani itu sendiri. Penelitian ilmu pengetahuan yang dilakukan oleh para peneliti akan menghasilkan ilmu pengetahuan yang dapat diandalkan dan dipertanggung jawabkan sesuai dengan fakta yang empiris dan sistematis yang telah ditemukan. Tujuan dilakukannya penelitian terdahulu adalah acuan peneliti untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang sedang menjadi objek penelitian.

Etik Kurniawati bersama Andri Kurniawan pada tahun 2016 dalam penelitiannya yang menganalisis tentang Persepsi Masyarakat terkait penggunaan Penelitian tentang persepsi Kartu Tani ini mengambil tujuan Bagaimana bentuk deskripsi dari sistem kartu tani dan untuk mengetahui bagaimana Masyarakat membangun persepsi terkait penggunaan kartu tani serta agar kendala dan harapan dapat diketahui karena lokasi penelitian ini mempunyai topografi daerah yang berbeda-beda berupa perbukitan dan daratan serta jenis tanaman yang berbeda pula maka dapat diketahui alokasi pupuk juga akan menyesuaikan hal ini menjadi latar belakang penelitian tersebut, apakah beberapa faktor tersebut dapat mempengaruhi persepsi petani dalam menggunakan Kartu Tani. Metode yang diambil untuk melakukan penelitian tersebut yaitu survei dan wawancara kepada para petani di dua daerah penelitian dengan menggunakan teknik analisis

deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Penelitian ini memiliki hasil dengan kesimpulan bahwa Sistem penggunaan yang dimiliki Kartu Tani dipengaruhi oleh sistem distribusi, subsidi dan informasi manajemen pertanian (SIMPI) lalu pada bagian persepsi yang diciptakan masyarakat yaitu adanya faktor kemudahan dalam penggunaan kartu tani , efektivitas pada daerah Topografi yang memiliki lahan datar dan perbukitan tidak memberi petunjuk bahwa ditemui unsur yang berbeda secara signifikan. Maka dapat disimpulkan bahwa unsur topografi tidak memberi pengaruh terhadap persepsi petani dalam pemanfaatan Kartu Tani serta ditemukan faktor penghambat dalam penerapan program Kartu Tani ini adalah masalah kegiatan sosialisasi yang kurang dilakukan di daerah Topografi perbukitan.

Dalam penelitian yang ditulis oleh Ardian Ozzy Wianto , Drajat Tri Kartono dan timnya meneliti bagaimana pengaruh sifat inovasi terhadap adopsi kartu tani di Kabupaten Pati. Kesesuaian dalam penelitian ini meliputi sejauh mana inovasi kartu tani sesuai dengan nilai-nilai sosial-budaya, pengalaman masa lalu dan kebutuhan petani responden Adopsi inovasi dalam penelitian ini merupakan tingkat adopsi yang dilihat dari tahapan adopsi yang dilakukan oleh petani responden dalam pengambilan keputusan terhadap program kartu tani yang meliputi pengenalan, persuasi, keputusan, pelaksanaan, dan konfirmasi. Hal tersebut dilihat dari kepemilikan kartu tani dan penggunaan kartu tani oleh petani responden bahwa secara bersama-sama keuntungan relatif, kesesuaian, kerumitan,

ketercobaan dan keteramatan berpengaruh terhadap adopsi inovasi kartu tani. Keuntungan relatif, kesesuaian, kerumitan dan keteramatan berpengaruh terhadap adopsi inovasi kartu tani. Ketercobaan tidak berpengaruh terhadap adopsi inovasi kartu tani.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Mutiara Latifa Ashari, Dra. Dyah Hariani, MM meneliti bahwa Faktor yang mempengaruhi efektivitas program kartu tani pada Kecamatan Banjarnegara yang dilakukan melalui beberapa fenomena ialah adanya perbaikan yang diperlukan dalam melaksanakan pelatihan kartu tani tentang cara penggunaannya sebanyak 35 hari sekali menyesuaikan wilayah yang telah di Bina dari Balai penyuluh pertanian Kecamatan Banjarnegara, selanjutnya diperlukan pembaruan atau regenerasi terkait sumber daya kelompok tani yang khususnya telah lanjut usia agar memberi kemudahan dalam mencapai tujuan program serta diperlukan pengadaan anggaran khusus sebagai bentuk peningkatan kualitas program.

Dalam makalah yang ditulis oleh Lutfil Chakim, Amzul Rifin, dan Bunasor Sanim mengeksplorasi bagaimana terjadinya permasalahan pada distribusi pupuk adalah sistem yang diterapkan saat ini menunjukkan kinerja yang belum optimal. Hal ini dibuktikan masih terdapat permasalahan pada praktik penyaluran pupuk bersubsidi yaitu terkait sisi perencanaan , distribusi hingga pengawasan , maka diperlukannya perbaikan dalam menyusun kebijakan ketika kegiatan perencanaan untuk

kebutuhan pupuk lalu untuk manajemen pengelolaan distribusi pupuk sampai pada hal pengawasan agar mampu memenuhi kriteria 6 Tepat Selanjutnya hasil penelitian juga menunjukkan bahwa implementasi Kartu Tani memberikan dampak yang signifikan terhadap penyaluran pupuk bersubsidi. Hal ini perlu terus didorong agar implementasi Kartu Tani dapat berjalan secara luas dan efektif untuk meningkatkan efektivitas penyaluran pupuk bersubsidi sesuai kriteria 5 tepat yang diteliti yaitu tepat harga, tepat tempat, tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat jenis.

Ni Ketut Sriwinarti dan Andres Faesal pada penelitian yang dilakukan terkait Implementasi Penggunaan Kartu Petani: Sebagai Media Pengendali Distribusi Pupuk Bersubsidi mempraktekkan Implementasi Kartu Tani yaitu melatih para petani untuk dapat melihat sistem informasi yang telah terinstalasi dan dapat dilihat pada website pengecer resmi sedangkan hasil penelitian memberi petunjuk bahwa RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) yang digunakan pemerintah untuk dasar mengendalikan distribusi pupuk bersubsidi belum bisa berjalan sesuai harapan karena masih terdapat kendala terkait masalah data yang tercantum pada RDKK ataupun pada saat menerapkannya , kemudian perihal kegiatan penyaluran masih bisa ditemukan perbedaan harga yang belum menganut pada HET

Salah satu solusi yang ditawarkan adalah dengan dibuatnya kartu cerdas (kartu tanda pemilik pupuk) yang merupakan identitas pemilik pupuk serta hak yang dimiliki. Selain itu System pendistribusian pupuk bersubsidi merupakan alternative System yang berperan dalam menagani

permasalahan di kalangan Masyarakat pada kecamatan Gerung, sistem ini akan memberi ketepatan ketika proses penyaluran pupuk dilakukan, artinya jumlah pupuk yang telah dibagikan memiliki ketepatan akan jumlahnya, dan juga jenis , harga juga akan diamati lebih baik lagi. Petani akan diberikan tanda identitas diri (Kartu Petani) sebagai tanda pengenal ketika melakukan pembelian pupuk dan dalam kegiatan penerimaan bantuan-bantuan dari pemerintah dengan mudah. Kartu ini tidak hanya namun juga membantu para pengecer untuk mudah mengetahui jumlah persediaan pupuk, pembelian pupuk yang sudah dilakukan serta identitas nilai jual pupuk pada tiap periode melalui sistem tersebut.

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan diatas, penelitian yang dilkakuakn oleh Nur Mufidah , Indah Prabawati, S. Sos, M. Si. dan team meneliti tentang Implementasi Program Penyaluran Pupuk Bersubsidi Melalui Kartu Tani Di Desa Durung Bedug Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo Dalam tujuan melakukan kebijakn pada sektor sumber daya lalu terdapat karakteristik serta pelakunya adalah agen pelaksana. Dibutuhkan Fundamental yang kuat yaitu Komunikasi kualitas tersampainya disposisi pada lingkungan ekonomi dan sospol. Pada penelitian ini jenis penelitian yag digunakan adalah deskriptif melalui pendekatan kualitatif , sedangkan tempat penelitian berada di Dintapan penanggung jawab Kartu Tani Sidoarjo dengan PPL Desa Bedug di desan Koorluh Kecamatn Candi, dan juga pengecer kios resi , dengan ketua kelompok taninya serta penerima Kartu Tani, sedangkan tehnik yang digunakan untuk mengumpulkan data

melalui kegiatan wawancara ,mengobservasi melakukan pengumpulan dokumentasi . Analisis data melalui pengumpulan data setelah itu akan direduksi samapi akhirnya menarik kesimpulan . Dari hasil penelitian yang diperoleh bahwa Implementasi Program menyalurkan pupuk subsidi di Desa Durung Bedug telah mencapai hasil yang cukup maksimal namun ada beberapa hal yang mengahdapi kendala terkait penebusasn menggunakan Kartu Tani.

Berbeda dengan keenam penelitian diatas Sularno, Nida Handayani dan Bambang Irawan pada penelitian yang dilakukan terkait pelaksanaan Kebijakan dan Distribusi Pupuk Bersubsidi di Karawang Jawa Barat , mengetahui bahwa kebijakan pemerintah untuk memenuhi urusan pengadaan pupuk bersubsidi agar masyarakat petani dapat memproduksi kualitas beras yang baik , sedangkan dalam proses pengadaan tersebut serta kegiatan pendistribusian pupuk subsidi ditemukan beberapa masalah dalam implementasi kebijakan tersebut , maka diperlukan suatu model yang mampu memberi jalan efektif dan efisien dalam pengadaan dan distribusi pupuk subsidi, sehingga masalah seperti penundaan , kekurangan dan waktu yang tidak efisien akan mempengaruhi ketepatan waktu tanam serta diperlukan bentuk pengawasan yang berkelanjutan, sehingga perlunya model distribusi pupuk agar dapat mencapai tujuan seperti halnya penghematan penggunaan anggaran pemerintah untuk subsidi , mudahnya pengendalian dan pengawasan , dan tingkat akurasi data RDKK ,

optimalisasi pelaku penggerak program pemerintah dan tanggung jawab yang jelas pada tiap wilayah.

Sejalan dengan penelitian diatas , penelitian yang dilkakuakn oleh Agus Dwi Nugroho, Abi Pratiwa Siregar, Erlinda Andannari, Yahya Shafiyudin dan JuliabInka Christie dalam artikelnya membahas Distribusi Pupuk Bersubsidi Di Kabupaten Bantul Provisni Daerah Istimewa Yogyakarta Kebijakan pupuk bersubsidi terbukti mampu meingkatkan luas areal panen danproduksi padi nasional. Selain itu, kebijakan subsidi harga pupuk menyebabkan seluruh sektor perekonomian dapat menambah outputnya serta meningkatkan pendapatan rumah tangga. Namun program pupuk bersubsidi belum efektif mengingat masih banyak persoalan, diantaranya maraknya ekspor pupuk ilegal, pasar pupuk domestik tanpa diikuti pengawasan dan penerapanvsanksi secara ketat sehingga distribusi pupuk bersubsidi belum tepat sasaran, distribusi belum efektif dan efisien, ketersediaan pupuk di petani masih langka karena perencanaan yang kurang akurat, pelaku pasar berspekulasi dengan menimbun pupuk bersubsidi, adanya fanatisme petani terhadap merk pupuk tertentu, harga pupuk di atas harga eceran tertinggi (HET) dan banyak distributor pupuk tidak memiliki armada dan gudang penyimpanan sehingga biaya yang dikeluarkan sangat. Walaupun distribusi pupuk bersubsidi mengalami berbagai masalah, petani masih tetap memiliki motivasi tinggi untuk menggunakan pupuk bersubsidi. Masalah dalam distribusi pupuk di Kabupaten Bantul antara lain database ketersediaan dan kebutuhan pupuk

tidak lengkap, pengecer menjual pupuk kepada selain kelompok tani sedangkan petani membeli pupuk tidak melalui kelompok tani, petani keberatan dengan fee kepada kelompok tani sehingga petani membeli pupuk langsung kepada pengecer ataupun membeli pupuk kepada kelompok tani namun di atas Harga Eceran Tertinggi, lokasi pengecer yang terlalu jauh dari lokasi petani, harga pupuk di atas HET karena adanya tambahan biaya transportasi dan masih banyak penyelewengan distribusi pupuk.

Dalam Penelitian yang dilakukan oleh Meliyanawati, Wulan Sumekar dan Tutik Dalmiyatun terhadap Adopsi sebuah program dalam judul Sikap dan Motivasi Petani Tanaman Padi Terhadap Adopsi Program Kartu Tani di Kabupaten Grobogan. Pada penelitian ini membahas tentang Kebijakan subsidi pupuk yang merupakan upaya dilakukan pemerintah untuk mengatasi permasalahan ketersediaan dan distribusi pupuk yang tidak merata, akan tetapi adanya kartu tani masih mengalami pro dan kontra di kalangan petani. Penelitian telah dilaksanakan di Kabupaten Grobogan pada tanggal 12 Februari 2019 sampai tanggal 5 Maret 2019. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis sikap, motivasi, adopsi dan pengaruh sikap dan motivasi terhadap adopsi program kartu tani. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah petani tanaman padi anggota kelompok tani berprestasi di Kabupaten Grobogan (Kelompok tani Maju, Kelompok tani Margo Husodo, Kelompok tani Karya Mukti). Sampel penelitian ditentukan secara acak dengan jumlah 86 responden diperoleh dari rumus Slovin.

Pengumpulan data dilakukan menggunakan metode wawancara dan observasi secara langsung. Data kemudian dianalisis menggunakan uji regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan karakteristik responden didominasi oleh laki-laki berusia produktif yang memiliki pengalaman bertani cukup lama, tetapi memiliki tingkat pendidikan yang relatif rendah. Sikap, motivasi dan adopsi petani terhadap kartu tani berturut-turut tergolong sedang. Faktor sikap dan motivasi berpengaruh terhadap adopsi. Variabel sikap dan motivasi mempengaruhi variabel adopsi sebesar 79,4% dan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain. Variabel sikap dan motivasi memiliki pengaruh sangat nyata terhadap variabel adopsi.

Sejalan dengan beberapa penelitian diatas pada penelitian yang dilakukan oleh Dewi Erlina Yunita dan team yang meneliti tentang Efektivitas Program Kartu Tani di Kecamatan Gemawang Kabupaten Temanggung , penelitian ini dilakukan bermula pada permasalahan yang sering terjadi dalam pendistribusian pupuk bersubsidi yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu. Kecamatan Gemawang merupakan salah satu wilayah yang sudah menerapkan kartu tani. Untuk mengetahui apakah kartu tani ini sudah berjalan sesuai dengan yang diharapkan maka penulis memfokuskan pada efektivitas program kartu tani di Kecamatan Gemawang Kabupaten Temanggung 2018. Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian diskriptif kualitatif, yaitu mengumpulkan data primer dengan teknik wawancara dan juga menggunakan teknik dokumentasi untuk mendapatkan data sekunder. Kedua teknik analisa data tersebut dirasa penting oleh peneliti untuk menunjang penelitiannya. Hasil penelitian menunjukan

program kartu tani di Kecamatan Gemawang sudah berjalan sesuai yang direncanakan oleh pemerintah untuk mengontrol transaksi pembelian pupuk bersubsidi dikalangan masyarakat petani. Petani juga merasa banyak manfaat dan juga dampak yang dirasakan setelah program kartu tani ini dilaksanakan di Kecamatan Gemawang. Setiap pelaksanaan sebuah program juga pasti ada faktor pendukung dan penghambat, dimana faktor pendukung dalam kartu tani ini adalah sinkronisasi seluruh pihak, adapun penghambatnya adalah Sumber Daya Manusia (petani) yang masih rendah. Dari hasil analisis penelitian, maka dapat disimpulkan berkaitan dengan efektivitas program kartu tani di Kecamatan Gemawang Kabupaten Temanggung sudah cukup efektif sesuai dengan indikator yang digunakan dalam penelitian. Hanya saja perlu peningkatan berkaitan dengan SDM petani untuk menyesuaikan diri dengan program baru tersebut.

NO	PENELITI/TAHUN	TUJUAN PENELITIAN	LANDASAN TEORI	METODE	HASIL PENELITIAN
1	Etik Kurniawati dan Andri Kurniawan Universitas Gajah Mada Yogyakarta 2016	Untuk mengetahui : 1. Perbedaan persepsi para petani yang mengerjakan usaha tani dalam topografi yang berbeda. 2. Kendala yang menjadi penghambat dalam menggunakan kartu tani seperti topografi dan jenis tanaman yang berbeda.	Landasan Teori yang digunakan : 1. Perbedaan Persepsi terhadap penggunaan Kartu Tani 2. Penilaian petani tentang program kartu tani secara keseluruhan. 3. Tata kelola Pupuk Bersubsidi dan pengaruh Topografi suatu daerah	Metode penelitian yang digunakan : 1. Survei kuesioner pada petani yang menerima kartu tani serta wawancara mendalam (indepth interview) 2. Penentuan daerah dilakukan dengan teknik <i>purposive</i> artinya diambil objek yang berbeda 3. Pertimbangan dalam memilih	Hasil Penelitian : 1. Persepsi dalam menggunakan kartu tani membuktikan tidak ada perbedaan persepsi terkait Topografi 2. Kartu Tani dalam penggunaan rata-rata hanya digunakan sebagai penebusan beli pupuk subsidi 3. Kurang adanya sosialisasi pada bagian topografi dataran tinggi. 4. Harapan para petani bahwa sistem ini lebih baik dipermudah

		3. Harapan kedepan yang dibutuhkan para petani terkait penggunaan Kartu Tani	yang dapat memengaruhi hasil penggunaan pupuk subsidi.	sampel menggunakan teknik <i>quota sampling</i>	dalam penggunaannya.
--	--	--	--	---	----------------------

2	<p>Ardian Ozzy Wianto, Drajat Tri Kartono, Dwiningtyas Padmaningrum</p> <p>Prosiding Seminar Nasional III Pascasarjana UNS 2019</p>	<p>Untuk mengetahui :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaruh terhadap sifat dari inovasi kartu tani kepada adopsi inovasi yang dilakukan oleh para petani. 2. Bagaimana tingkat partisipasi petani dalam menggunakan Kartu Tani. 	<p>Landasan Teori :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melalui Karakteristik gender pengguna Kartu Tani 2. Analisis Sikap terkait program Kartu Tani terhadap petani tanaman Padi 3. Analisis Motivasi terkait penggunaan Kartu Tani kepada petani tanaman Padi. 	<p>Metode Penelitian :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Metode Survei dengan mengambil sampel serta populasi untuk alat mengumpulkan data 2. purposive sampling melalui kriteria responden sebagai petani anggota kelompok tani yang berprestasi 	<p>Hasil Penelitian :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya pengaruh yang jelas bahwa keuntungan relatif, kerumitan, kesesuaian serta ketrampilan terhadap adopsi kartu tani oleh para petani. 2. Pengaruh yang tidak terlihat pada analisis Ketercobaan pada adopsi Inovasi Kartu Tani.
3	<p>Mutiara Latifa Ashari, Dra. Dyah Hariani, MM</p> <p>Departemen Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro</p>	<p>Untuk mengetahui :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana efektivitas kartu tani di kecamatan Banjarnegara 2. Apa saja faktor yang menghambat efektivitas kartu tani di Kecamatan Banjarnegara 	<p>Landasan Teori :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Teori administrasi Publik 2. Sistem Manajemen Publik 3. Efektivitas suatu program khususnya Kartu Tani 	<p>Metode Penelitian :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Deskriptif Kualitatif 2. Subjek penelitian, menggunakan teknik <i>purposive sampling</i>. 	<p>Hasil Penelitian :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Efektivitas Program Kartu Tani di Banjarnegara belum mencapai tujuan. 2. Kondisi Lingkungan dan sumber daya pelaksana menjadi penghambat efektivitas suatu program penerapan Kartu Tani

4	<p>Lutfil Chakim, Amzul Rifin, dan Bunasor Sanim</p> <p>Program Studi Manajemen dan Bisnis, Sekolah Bisnis IPB 2019</p>	<p>Untuk mengetahui :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana Implementasi Efektivitas Kartu Tani. 2. Bagaimana Efektivitas Penyaluran pupuk Bersubsidi. 3. Dampak terhadap penyaluran pupuk bersubsidi. 	<p>Landasan Teori :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Analisis Efektivitas Kartu Tani. 2. Implementasi Kartu Tani 	<p>Metode Penelitian :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Metode deskriptif kuantitatif 2. Pengumpulan data akan diolah dengan metode Structural Equation Model (SEM) 3. Metode untuk memberi prediksi dengan banyak faktor dan ubungan collinear menggunakan Partial Least Squares (PLS) 	<p>Hasil Penelitian :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Distribusi Pupuk yang tidak berjalan dengan baik disebabkan adanya sistem yang diterapkan belum optimal. 2. Tingkat Partisipasi Petani terhadap penggunaan Kartu Tani masih Rendah 3. Masalah umum terjadi ketika ditemukan adanya pupuk subsidi langa , distribusi pupuk terlambat dan harga yang tidak berada di ketentuan.
5	<p>Ni Ketut Sriwinarti, Andres Faesal.</p> <p>Prosiding SENTIA Politeknik Negeri MALANG 2016</p>	<p>Untuk mengetahui :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana sistem Kendali pendistribusian pupuk subsidi yang secara langsung dihubungkan dengan produsen, distributor dan juga pengecer 2. Untuk menganalisis apakah sistem subsidi pupuk dapt dikendalikan seperti sistem subsidi BBM 	<p>Landasan Teori :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Analisis adopsi kartu tani terhadap pengaruh berbagai faktor 2. Analisis Sifat Inovasi 	<p>Metode Penelitian :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Metode survei dengan pengambilan sampel diambil dari populasi 2. Pengumpulan Data dilakukan dengan menyebar kuesioner. 	<p>Hasil Penelitian :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dijelaskan bahwa selama ini pengaruh kurang baik atas berjalannya Distribusi pupuk adalah RDKK 2. Diperlukannya sistem yang mampu para petani untuk mudah memahami dalam penyaluran pupuk bersubsidi sampai ke tangan yang tepat dan memeberi jalur kemudahan dalam menerima bantuan dari pemerintah lewat Kartu Cerdas Petani.
6	<p>Nur Mufidah dan</p>	<p>Untuk mengetahui :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. menganalisis Implementasi 	<p>Landasan Teori :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Implementasi Kebijakan 	<p>Metode Penelitian :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengumpulan data melalui 	<p>Hasil Penelitian :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Implementasi Kartu Tani masih

	<p>Indah Prabawati, S. Sos, M. Si.</p> <p>S1 Jurusan administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan hukum Universitas Negeri Surabaya</p>	<p>program penyaluran pupuk bersubsidi melalui Kartu Tani di Desa Durung Bedug Candi Sidoarjo</p> <p>2. mengidentifikasi faktor-faktor Implementasi program penyaluran pupuk bersubsidi melalui Kartu Tani di Desa Durung Bedug Candi Sidoarjo</p>	<p>program Kartu Tani</p> <p>2. Implementasi Kebijakan berdasar dari karakteristik sumber daya komunikasi agen pelaksana</p>	<p>wawancara kepada narasumber, observasi dan pengambilan dokumentasi</p> <p>2. Analisis data akan direduksi hingga menjadi penarikan kesimpulan</p>	<p>terkendala akan kesiapan sistem yang masih belum optimal karena mesin EDC yang tidak bisa membaca alokasi pupuk</p> <p>2. Belum ada dana Khusus untuk keberlangsungan program kartu tani</p>
7	<p>Sularno Nida Handayani dan bambang Irawan</p> <p>Agrosains dan Teknologi, Vol. 1 No. 2 Desember 2016</p>	<p>Untuk mengetahui :</p> <p>1. Model dari sistem pendistribusian pupuk bersubsidi agar berkalan secara efektif dan efisien</p> <p>2. Menganalisis model distribusi pupuk atas rekomendasi Pemerintah Daerah Karawang dan dilakukan sensitisasi atau penerapan peraturan</p>	<p>Landasan Teori :</p> <p>1. Tata Kelola Distribusi</p> <p>2. Analisis Penerapan Peraturan Menteri Pertanian</p>	<p>Metode Penelitian :</p> <p>1. Pendekatan Kualitatif</p> <p>2. Teknik Snow Ball sebagai penentu informan secara purposif</p>	<p>Hasil Penelitian :</p> <p>1. Ditemukan hasil penelitian yang mana terdapat banyak penyimpangan dalam implementasi Kartu Tani.</p> <p>2. Tidak Konsisten ketika pendataan RDKK yang masih diluar perhitungan</p>
8	<p>Agus Dwi Nugroho, Abi Pratiwa Siregar, Erlinda Andannari,</p>	<p>Untuk mengetahui :</p> <p>1. Analisis ketersediaan dan kebutuhan distribusi pupuk subsidi</p> <p>2. Mengevaluasi</p>	<p>Landasan Teori :</p> <p>1. Efektivitas distribusi pupuk ditentukan dengan analisis enam</p>	<p>Metode Penelitian:</p> <p>1. Membandingkan informasi atau data di antara berbagai stakeholder, teknik ini biasa</p>	<p>Hasil Penelitian :</p> <p>1. Komitmen yang kuat dalam kolaborasi antara pemerintah dalam hal ini Kabupaten dan Desa, CSO,</p>

	<p>Yahya Shafiyudin dan Julia Inka Christie</p> <p>AGROSOCIOECONOMICS UNDIP (4 April 2018)</p>	<p>pelaksanaan dan merumuskan saran dalam pengembangan distribusi pupuk di Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta</p>	<p>tepat distribusi pupuk</p> <p>2. Efisiensi diukur dengan menggunakan margin pemasaran.</p>	<p>disebut sebagai triangulasi.</p>	<p>Sektor swasta dan masyarakat menghasilkan kekuatan besar dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.</p>
9	<p>Meliyanawati, Wulan Sumekar, Tutik Dalmiyatun.</p> <p>Program Studi S1 Agribisnis Fakultas Peternakan dan Pertanian Universitas Diponegoro. (Mei 2020)</p>	<p>Untuk mengetahui :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Analisis Sikap dan Motivasi Petani Tanaman Padi 2. Analisa Adopsi Program Kartu Tani di Kabupaten Grobogan 	<p>Landasan teori :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan subsidi pupuk merupakan upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi permasalahan ketersediaan distribusi pupuk 2. Adopsi Kartu Tani dikalangan Petani yang melihat sisi Pro dan Kontra 	<p>Metode penelitian :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. metode survei. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah petani tanaman pada anggota kelompok tani berprestasi di Kabupaten Grobogan 	<p>Hasil Penelitian :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sikap dan motivasi berbanding lurus dengan adopsi, semakin baik sikap petani dan semakin besar motivasi yang mendorong petani 2. Adopsi petani terhadap suatu program juga semakin baik. sikap, motivasi dan adopsi petani terhadap program kartu tani secara berturut-turut tergolong sedang.
10	<p>Dewi Erlina Yunita</p> <p>Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 2019</p>	<p>Untuk mengetahui :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. efektivitas program Kartu Tani di Kecamatan Gemawang Kabupaten Temanggung 2. Menganalisis faktor penghambat efektivitas program Kartu Tani di Kecamatan Gemawang 	<p>Landasan Teori :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Efektivitas program Nasional 2. Efektivitas program kartu tani melalui beberapa aspek penelitian keberhasilan program. 	<p>Metode Penelitian :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam penelitian ini penggunaan metode penelitian diskriptif kualitatif. 2. Pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi 	<p>Hasil penelitian:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menunjukkan program Kartu Tani telah sesuai terhadap rencana pemerintah karena mengacu pada faktor sinkronisasi seluruh pihak terutama SDM Petani itu sendiri. 2. Faktor penghambat berada dalam sumber daya

		Kabupaten Temanggung			penggerak kartu tani.
--	--	-------------------------	--	--	--------------------------

1.5.2 Administrasi Publik

1.5.2.1 Administrasi

Administrasi sebagai ilmu yang mengkaji dan menilai praktek Administrasi di berbagai macam negara, tidak dipungkiri akan menemui perubahan yang sering terjadi akan perkembangan persoalan yang sangat kompleks hal ini ditanggapi dengan baik oleh para ahli dan teoritis dalam rangka mengembangkan Ilmu Administrasi Publik. Dalam arti sempit Administrasi oleh Handayani (2002:2) pada buku Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen mengartikan bahwa Administrasi dalam arti sempit adalah Administrasi secara sempit berasal dari kata *Administratie* dalam bahasa Belanda yaitu yang meliputi kegiatan catat mencatat, surat menyurat, pembukuan, ketik-mengetik, agenda dan sebagainya yang bersifat teknis ketatausahaan atau yang disebut Clerical Work. Sedangkan pengertian Administrasi dalam arti luas oleh Sondang P. Siagian (2004:2) memberi definisi Administrasi sebagai keseluruhan proses pelaksanaan dari keputusan-keputusan yang telah diambil dan pelaksanaan itu pada umumnya dilakukan oleh dua orang manusia atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Beberapa definisi yang telah dijelaskan di atas, peneliti mengambil kesimpulan Administrasi sebagai proses kegiatan yang terencana dan efektif dan dilakukan oleh sekelompok orang dengan tujuan serta kepentingan yang sama.

1.5.2.2 Administrasi Publik

Definisi Administrasi oleh Rosenbloom (2005), dalam Pasolong 2017 Administrasi Publik adalah Pemnafaatan teori-teori dan proses manajemen, politik dan Hukum untuk memenuhi keinginan pemerintah di bidang legislative, eksekutif dalam rangka fungsi-fungsi pengaturan dan pelayanan terhadap Masyarakat secara keseluruhan dan sebagian . Selanjutnya Pasolong (2017:19) menjelaskan bahwa Administrasi Publik adalah Kerjasama yang dilakukan oleh sekelompok orang atau lembaga dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintah dalam memenuhi kebutuhan publik secara efisien dan efektif.

Beberapa definisi telah dijelaskan sehingga peneliti dapat menyimpulkan bahwa Administrasi Publik adalah Seluruh Proses kegiatan Pemerintah yang mencakup kepentingan Masyarakat melalui pelaksanaan Kebijakan Pemerintah dan Manajemen Publik yang baik.

1.5.2.3 Paradigma Administrasi Publik

Denhardt dan Denhardt menejelaskan bahwasannya pada 3 (tiga) Prespektif pada Paradigma Administrasi Publik antara lain :

1. Old Public Administration atau sebagai Administrasi Publik Klasik memiliki fokus perhatian pada interkasi dan kerjasama di dalam Organisasi pemerintah yang dibangun melalui Hirarki dalam penjelasnya Pemerintah melakukan kegiatan Administrasi dengan cara yang efisien, efektif serta bebas dari manipulasi untuk bisa beroperasi

secara tepat (Wilson, 1887). Old Public Administrasion bercirikan sebagai berikut :

- Pelayanan bermoral
- Aparat berteladan
- Loyalitas akan penguasanya
- Prosedur Birokrasi yang Formal

2. New Public Management adalah bentuk reformasi karena ketika organisasi publik diidentikan dengan tidak efisien, tidak efektif, tidak produktif, tidak kreatif serta miskin inovasi. Pendekatan NPM ini menghendaki suatu birokrasi publik yang memiliki kriteria *Good Governance*, dengan kemampuan memacu kompetisi, akuntabilitas, responsip terhadap perubahan, transparan, berpegang pada aturan hukum, mendorong adanya partisipasi pengguna jasa, mementingkan kualitas, efektif dan efisien, mempertimbangkan rasa keadilan bagi seluruh pengguna jasa, dan terbangunnya suatu orientasi pada nilai-nilai untuk mewujudkan *Good Government* itu sendiri. Karakteristik utama NPM adalah perubahan lingkungan birokrasi yang didasarkan pada aturan baku menuju sistem manajemen publik yang lebih fleksibel dan lebih berorientasi kepada kepentingan publik.

- Bekerja pada sektor privat bisnis dan publik
- Menjelaskan adanya Good Governance
- Efektiv dan Efisien pada pekerjaan sektor Swasta
- Terlihatnya pelayanan sipil dan mulai menganut kontrak kerja

➤ Sistem anggaran dinilai berdasarkan Kinerja dan Hasil

3. New Public Service timbul karena Perspektif NPM memperoleh kritik keras dari banyak pakar. Mereka memandang bahwa perspektif ini, seperti halnya perspektif *Old Public Administration*, tidak hanya membawa teknik administrasi baru namun juga seperangkat nilai tertentu. Masalahnya terletak pada nilai-nilai yang dikedepankan tersebut seperti efisiensi, rasionalitas, produktivitas dan bisnis karena dapat bertentangan dengan nilai-nilai kepentingan publik dan demokrasi. Dalam model New Public Service adalah teori manajemen publik yang mengajarkan egaliter dan persamaan hak diantara warga negara. Dalam model ini kepentingan publik dirumuskan sebagai hasil dialog dari berbagai nilai yang ada di dalam masyarakat. Kepentingan publik bukan dirumuskan oleh elite politik seperti yang tertera dalam aturan.

➤ Pemerintahan yang berdemokrasi

➤ Kepentingan Administrasi publik yang sifatnya lebih banyak mendengar aspirasi

➤ Kerja sama yang banyak membentuk adanya Jaringan Kerja

➤ Mengedepankan prinsip Akuntabilitas dan Transparansi

Dari penjelasan teori Administrasi Publik diatas peneliti menggunakan Paradigma *New Public Management* (NPM)

1.5.2.4 New Public Management

Perspektif yang telah dijelaskan hal ini sebagai bukti Administrasi Publik telah memberi banyak perhatian kepada pemerintah dalam melakukan tindakan

kegiatan administrasi yang lebih bersifat Demokratis , efisien dan efektif serta bebas berbagai macam manipulasi. Dalam perjalanan ditemukan beberapa kepentingan yang belum mampu memberi dampak baik hal penting tersebut adalah Organisasi Publik yang mempunyai identitas tidak efisien , tidak produktif , tidak efektif dan miskin akan Inovasi, maka mulailah diciptakan gerakan yang melakukan reformasi terhadap Manajemen sektor Publik, yang menciptakan suatu paradigma yaitu New Public Management.

New Public Management digagas oleh Christopher Hood pada tahun 1991 , pendekatan yang dilakukan oleh paradigma NPM adalah bahwasannya Birokrasi Publik memiliki suatu kriteria sebagai Good Governance yang mempunyai kemampuan untuk memiliki sifat akuntabilitas, respon yang baik terhadap perubahan, bersifat transparan, mengedepankan aturan hukum yang berlaku, mendukung partisipasi pengguna jasa, memikirkan pentingnya suatu kualitas, efektif dan efisien serta selalu memberi pertimbangan atas keadilan bagi seluruh pengguna jasa dan berusaha mewujudkan nilai-nilai pada Good Government. Paradigma New Public Management beranggapan bahwa praktik manajemen sektor swasta itu lebih baik dari sektor publik seperti halnya adopsi mekanisme pasar dan hal tentang privatisasi perusahaan publik, maka hal yang perlu diperhatikan adalah perubahan lingkungan Birokrasi dengan didasari oleh aturan yang mempunyai tujuan mewujudkan Manajemen Publik yang fleksibel dan selalu berorientasi kepada kepentingan Publik, sedangkan dalam asumsi Paradigma New Public Service bahwa Pelayanan Publik yang ideal harus bersifat responsif atas kepentingan dan nilai-nilai publik yang ada.

Pada kenyataanya meskipun NPS adalah paradigma paling ideal karena mementingkan keadilan agar semua masyarakat mendapat pelayanan publik yang seksama, semua hal tersebut juga sulit dilakukan di Indonesia karena ketika pemerintah menyediakan akses pelayanan publik melalui syarat harus mengorbankan finansial dari warga negara sebagai pengguna layanan. Penelitian ini akan menggunakan paradigma *New Public Management* karena paradigma ini dipandang sebagai pendekatan dalam administrasi publik yang menerapkan pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh dalam manajemen bisnis dan disiplin lain untuk memperbaiki efisiensi, efektivitas, dan kinerja pelayanan publik pada birokrasi modern.

1.5.2.5 Manajemen Publik

Manajemen Pemerintahan umum juga dikenal sebagai Manajemen Publik artinya Pemerintah mengupayakan untuk memenuhi kebutuhan warga negara melalui sarana dan prasarana. Manajemen menjadi unsur yang penting ketika menyelenggarakan organisasi pada sektor publik seperti halnya Organisasi Pemerintah dan swasta. Orientasi Keputusan Sektor Publik tidak berdasar pada pemeliharaan individu dalam pasar namun pemilihan kolektif setelah itu akan disampaikan oleh para perwakilan yaitu Partai Politik atau Dewan Perwakilan Rakyat. Sektor Publik menghadapi permasalahan tentang mendistribusikan kesejahteraan sosial sedangkan pada sektor swasta tidak memikirkan tanggung jawab untuk memikirkan kepentingan membagi keadilan sosial. Organisasi sektor publik pada kekuasaan tertinggi dipegang oleh rakyat , pada beberapa hal rakyat adalah pelanggan , namun pada keadaan tertentu rakyat juga bukan sebagai

pelanggan. Sektor Swasta kompetisi menjadi instrument pasar sedangkan pada sektor publik tindakan kolektif sebagai instrument Pemerintah, hal itu yang menjadi sulit ketika pemerintha harus memenuhi setiap kebutuhan masyarakat secara kolektif. Pendekatan Manajerialisme yang memeiliki tujuan dalam pemenuhan tujuan demi mencapai visi dan misi dan pemenuhannya bersifat jangka panjang , beberpa fungsi strategik , seperti perencanaan dan pembuatan program yang mana harus dilakukan oleh Manajer publik , terdapat tiga fungsi yang dijelaskan Alison dalam buku Mahmudi secara umum yang berlaku pada sektor publik ataupun swasta terdiri dari :

1. Fungsi Strategi
 - a. Penetapan prioritas serta tujuan organisasi tersebut
 - b. Demi mencapai tujuan harus membuat perencanaan operasional
2. Fungsi Manajemen Komponen Internal
 - a. Menyusun staff dan mengorganisasikan
 - b. Manajemen Sumber daya manusia yang terarah
 - c. Kinerja yang terkendali
3. Fungsi Manjemen Konstituen Eksternal
 - a. Hubungan pada Unit Eksternal Organisasi
 - b. Hubungan di Organisasi lainnya
 - c. Huungan Publik dengan Pers

1.5.2.6 Efektivitas

Menurut pendapat yang dikemukakan oleh Chung & Megginson (1981:506, dalam Siahaan, 1999:17) mengemukakan bahwa efektivitas merupakan istilah yang diungkapkan dengan cara yang berbeda dan dengan orang yang berbeda pula. Menurut Chung dan Megginson yang disebut dengan efektivitas adalah kemampuan tingkat dalam pencapaian tujuan dan kemampuan menyesuaikan diri dengan lingkungan agar suatu organisasi itu tetap hidup.

Menurut Subagyo (2000) bahwa efektivitas merupakan kesesuaian antara output dengan tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas merupakan suatu keadaan yang terjadi karena dikehendaki. Sedangkan Makna efektivitas menurut Hadayaningrat, (1995:16) mengemukakan bahwa efektivitas merupakan suatu pengukuran dimana target telah tercapai sesuai dengan apa yang sudah direncanakan.

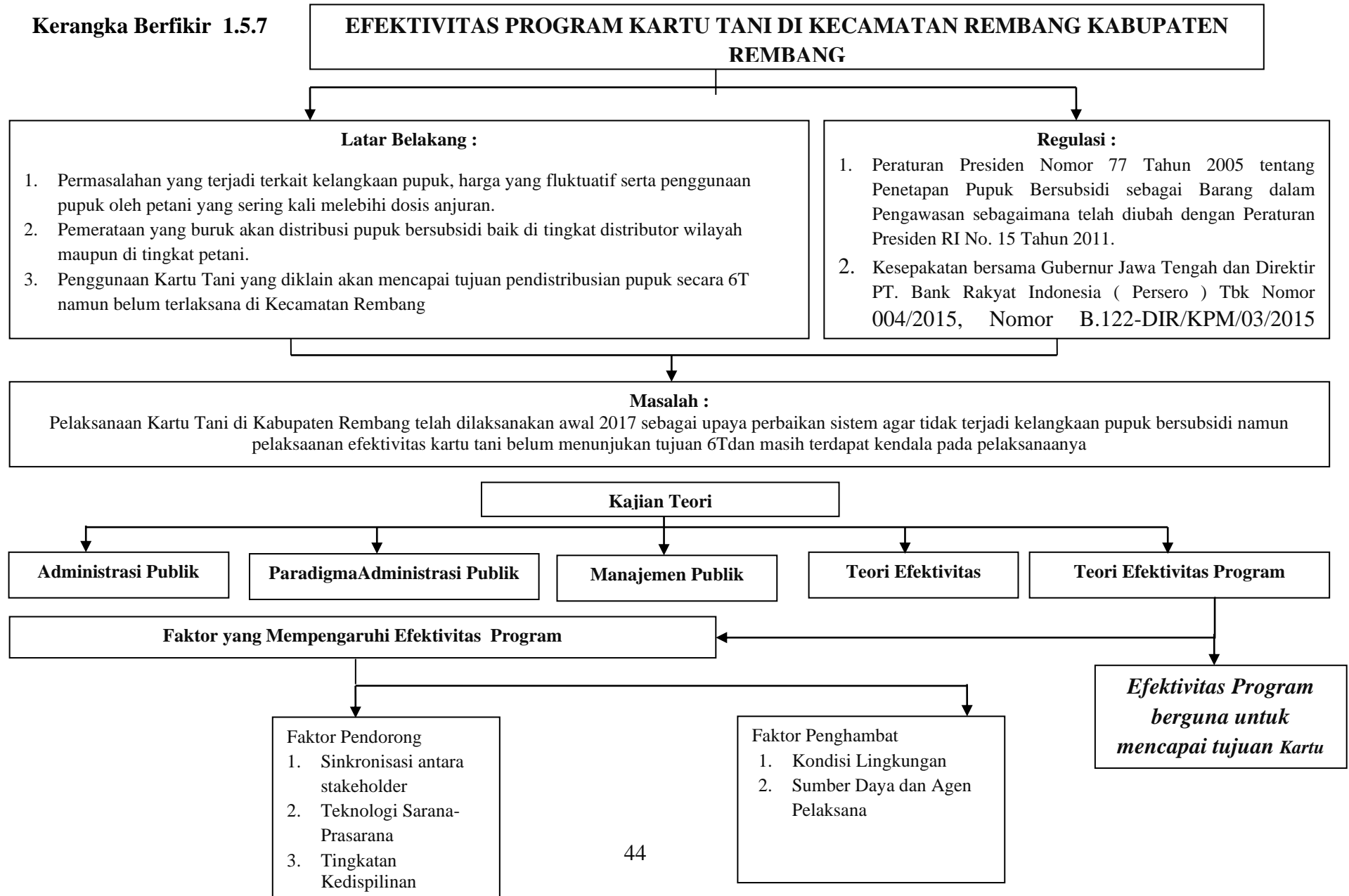
Beberapa definisi telah dijelaskan sehingga peneliti dapat menyimpulkan bahwa Efektivitas adalah Ukuran suatu pencapaian dalam mencapai target yang direncanakan.

1.5.2.7 Efektivitas Program

Dalam penelitian ini, peneliti membatasi penelitian dalam efektivitas suatu program, karena Efektivitas penerapan Kartu Tani di Kecamatan Rembang masuk ke dalam lingkup tingkat keberhasilan suatu program, sehingga Keberhasilan penggunaan Kartu Tani juga dilihat secara keseluruhan, yaitu dari efektivitas Programnya sehingga peneliti menggunakan teori menurut Sutrisno (2007:125-126) telah berhasil mengidentifikasi hasil studi para ahli mengenai ukuran efektifitas program adalah :

1. Pemahaman program, yaitu dilihat sejauh mana masyarakat dapat memahami kegiatan suatu program
2. Tepat sasaran, yaitu dilihat melalui pengetahuan yang telah diberikan para pengelola Program tersebut
3. Tepat waktu, yaitu dilihat melalui penggunaan waktu untuk pelaksanaan program yang telah direncanakan tersebut apakah telah sesuai dengan yang diharapkan sebelumnya.
4. Tercapainya tujuan, yaitu diukur melalui pencapaian tujuan kegiatan yang telah dijalankan, baik melalui pelatihan program maupun kegiatan lainnya.
5. Perubahan nyata, yaitu diukur melalui sejauhmana kegiatan tersebut memberikan suatu efek atau dampak serta perubahan nyata bagi masyarakat ditempat.

Kerangka Berfikir 1.5.7



1.6 Fenomena Penelitian

1.6.1 Efektivitas pelaksanaan program kartu tani di Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang

Fenomena Penelitian dapat berisi tentang beberapa aspek tentang keadaan yang berkaitan dengan persoalan yang hendak diteliti. Fenomena yang akan di amati dalam penelitian ini adalah Efektivitas pelaksanaan program kartu tani di Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang sesuai kesepakatan bersama yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Tengah bersama Direktur BRI yang dilakukan pada 4 Maret 2015 mengenai Kartu Tani sebagai alat transaksi (penebusan dan pembayaran) untuk setiap petani di Jawa Tengah. Pada penelitian ini akan meneliti apakah Efektivitas program Kartu Tani dalam pelaksanaannya sudah konsisten dengan spesifikasi desain program dan menunjukkan kinerja sesuai dengan tujuannya. Serta untuk mengidentifikasi beberapa faktor yang menghambat dalam efektivitas pelaksanaan program kartu tani di Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang program kartu tani ini diharapkan dapat melaksanakan pendistribusian pupuk bersubsidi dengan Asas 6 (enam) Tepat (tepat jumlah, jenis, waktu, tempat, mutu dan harga) dan mampu memberikan pelayanan perbankan bagi setiap petani di Kecamatan Rembang Melalui fenomena penelitian ini peneliti akan menganalisis bagaimana seharusnya Pelaksanaan Program Kartu Tani tersebut berjalan sesuai peraturan untuk mencapai tujuan dari program itu sendiri serta faktor-faktor apa saja yang menghambat pelaksanaan program kartu tani. Pada penelitian ini untuk melihat beberapa indikator pengukuran tingkat efektivitas suatu program peneliti menggunakan teori dari Sutrisno (2007) sebagai berikut :

1) Pemahaman Program

Pemahaman Program adalah Indikator yang menjelaskan bagaimana suatu program direalisasikan sehingga dapat dengan mudah diterima dan dipahami. Hal ini dimaksudkan ketika program dijalankan dapat dengan mudah dan efektif dalam proses pelaksanaannya.

Pihak yang perlu memahami program ini adalah semua pihak yang terlibat dalam proses kegiatan Program Kartu Tani di Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang.

2) Ketepatan Sasaran

Keberhasilan sasaran merupakan Ketepatan suatu program dalam mencapai target tujuan yang ditentukan melalui sasaran yang sudah ditentukan, apakah sudah tepat sasaran atau justru sebaliknya dan memberikan dampak perubahan pada penerima program. Keberhasilan sasaran Program Kartu Tani di Kecamatan Rembang dapat diketahui melalui analisis ketepatan sasaran dan latar belakang pada program kartu tani yaitu petani pemilik lahan maupun penggarap lahan.

3) Ketepatan Waktu

Indikator Ketepatan Waktu merupakan hal yang penting dalam suatu proses kehidupan. Ketepatan waktu dalam hal ini yaitu ketika suatu program sesuai dengan aturan waktu. Semakin tepat pada saat pelaksanaan program kartu tani di Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang maka semakin efektif program tersebut dapat terealisasi.

4) Tercapainya tujuan

Pada Indikator tercapainya tujuan yaitu untuk menilai tingkat keefektifan suatu program dengan mengetahui bagaimana tujuan yang telah ditetapkan sejak awal dapat dicapai. Tercapainya tujuan pada suatu program dilihat dari sejauh mana beberapa tujuan yang sudah menjadi aturan sejak awal program kartu tani di Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang ini dapat dicapai.

5) Perubahan Nyata.

Pada Indikator perubahan nyata yaitu untuk mengetahui bahwa aturan yang telah ditetapkan sejak awal dapat direalisasikan dengan baik sesuai dengan rencana. Kemudian sasaran dari program disini juga berperan penting dalam melaksanakan program kartu tani di Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang. Artinya dengan melihat, meninjau, dan

meneliti langsung apakah memberikan perubahan bagi para warga masyarakat. Perubahan bisa terjadi dalam kategori positif maupun negatif.

6) Faktor Pendorong

Efektivitas Program Kartu Tani Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang, dapat diketahui efektif atau tidak melalui dan faktor pendorong seperti :

- a) Sinkronisasi antara stakeholder, yakni Pihak terkait dalam kartu tani mencakup pemerintah, petani, desa, dan pihak Bank BRI. Kerjasama sangat dibutuhkan, ketika kerjasama tidak dilakukan oleh salah satu pihak maka sebuah program tidak akan berjalan dengan baik.
- b) Teknologi Sarana dan Prasarana, yakni keseluruhan terhadap kegiatan pengadaan dan pendayagunaan serta beberapa komponen yang mana secara langsung atau tidak langsung membantu tertibnya penerapan sebuah program untuk mencapai tujuan.
- c) Tingkatan Kedisiplinan pengguna Kartu Tani yakni petani berpartisipasi atau mengikuti program kartu tani, membeli pupuk bersubsidi menggunakan kartu tani yang sudah dimiliki, dengan jumlah kuota pupuk yang sudah ditentukan oleh pemerintah

7) Faktor Penghambat

Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Program Menurut G. Shabbir Cheema dan Dennis A. Rondinelli (1983) (dalam Mutiarin Dyah dan Zaenudin Arif, 2014:98-99) menyebutkan faktor yang mempengaruhi efektifitas dan dari suatu program yaitu sebagai berikut: Efektivitas Program Kartu Tani Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang, dapat diketahui efektif atau tidak melalui dan faktor penghambat seperti :

1. Kondisi Lingkungan, yakni Kondisi yang berasal dari suatu Kultur kebudayaan, Kondisi Geografis, kondisi ekonomi serta Kondisi Hukum.
2. Sumber Daya dan Agen Pelaksana yaitu sumber daya yang digunakan untuk mendapatkan manfaat dari pelaksanaan sehingga mampu berperan dalam menentukan berhasil tidaknya tujuan program dan hal penting yang dapat diambil adalah kemampuan, kredibilitas serta uji kompetensi oleh para pelaksana.

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Jenis Penelitian

Pada penelitian ini peneliti memilih untuk menggunakan jenis Penelitian Kualitatif Eksploratif yang berarti peneliti melakukan pengembangan, menggali serta menganalisis setiap Informasi yang berkaitan terhadap “Efektivitas Program Kartu Tani Di Kabupaten Rembang.”. Pada penelitian ini Jenis penelitian kualitatif dilakukan dengan mempertimbangkan data yang telah diperoleh dari lapangan seperti data pada bentuk fakta sehingga memerlukan analisis. Pendekatan Kualitatif membuat peneliti lebih banyak terlibat dalam memenuhi data yang diperlukan secara kongkrit. Dalam penelitian kualitatif peneliti sebagai instrument utama dalam mengumpulkan data yang tepat dan berhubungan langsung dengan instrument atau objek dalam penelitian tersebut. Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode deskripsi kualitatif karena peneliti akan mendeskripsikan bagaimana efektivitas program kartu tani di Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang dan Apa saja yang menjadi faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan program kartu tani di Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang.

1.7.2 Situs Penelitian

Situs penelitian menentukan serta ditetapkan letak atau wilayah penelitian akan dilakukan. Penelitian ini dilaksanakan di situs penelitian Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan lebih

tepatnya pada Balai Penyuluh Pertanian Kota Rembang, lalu akan dilanjutkan pada Studi Lapangan di Kecamatan Rembang yaitu kepada para petani penerima kartu tani dan pengecer kios resmi . Kecamatan Rembang dipilih untuk menjadi situs penelitian tersebut karena dianggap memenuhi kriteria untuk dilakukan penelitian dan pengumpulan data oleh peneliti.

1.7.3 Subyek Penelitian

Subyek Penelitian merupakan sumber data dari penelitian tentang variabel-variabel yang akan diteliti. Dalam melaksanakan penelitian ini dibutuhkan informan atau yang disebut sebagai narasumber, subyek penelitian dapat dilakukan pada individu ataupun kelompok sebagai narasumber untuk memberi keterangan yang jelas mengenai sesuatu terkait fenomena dan kasus yang sedang diteliti. Kegiatan dalam menentukan Informan dapat dilakukan melalui:

1. Pejabat Balai Penyuluhan Pertanian Kota Rembang.
2. Petugas Penyuluh Lapangan (PPL)
3. Agen Kios Resmi
4. Kelompok Tani
5. Petani pengguna aktif Kartu Tani.

1.7.4 Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. Data Primer

Data primer diperoleh secara langsung dari sumber data melalui kegiatan wawancara kepada informan serta kegiatan observasi kepada pihak sebagai objek penelitian yaitu Efektivitas Program Kartu Tani Di Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang.

b. Data Sekunder

Data sekunder didapatkan dari banyak informasi data, sehingga dalam memperkuat fakta data tersebut dapat dilakukan dengan melengkapi data-data yang memiliki

hubungan kuat atas objek penelitian Efektivitas Program Kartu Tani Di Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang.

1.7.5 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik yang digunakan peneliti dalam pengumpulan data adalah:

a. Observasi

Teknik pengumpulan data melalui pengamatan langsung kepada objek penelitian , peneliti mampu mengartikan fenomena serta mengerti apa yang dirasakan oleh subjek penelitian.

b. Wawancara

Kegiatan wawancara kepada informan atau narasumber akan mengetahui lebih jelas terkait intrestasi situasi dan fenomena yang terjadi serta melihat partisipan, karena hal ini tidak dapat diperoleh hanya dengan kegiatan Observasi. Mengumpulkan data dengan melakukan komunikasi langsung dengan Informan terkait data dan bahan Penelitian Efektivitas Program Kartu Tani Di Kabupaten Rembang.”.

c. Dokumentasi

Teknik ini merupakan teknik pengumpulan data berupa gambar-gambar, dokumen resmi, ataupun data resmi yang didapatkan dari berbagai sumber.

d. Studi Pustaka

Studi Pustaka dilakukan dengan mencari referensi dan literatur yang dapaat berupa buku, surat kabar, jurnal, peraturan daerah, undang-undang dan sebagainya yang sesuai dengan topik penelitian yaitu Efektivitas Program Kartu Tani Di Kabupaten Rembang.

Pada penelitian ini teknik yang dilakukan untuk pengumpulan data adalah observasi, wawancara dengan pihak-pihak terakit, dokumentasi dan studi pustaka melalui penelitian terdahulu tentang Peneltian Efektivias Program Kartu Tani.

1.7.6 Analisis dan Interpretasi Data

Teknik analisis data pada Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif menganut pada Konsep yang dipopulerkan oleh Huberman dan Miles dalam buku Bungin (2012: 69) dijelaskan bahwa teknik analisis data kualitatif dilaksanakan dengan interaktif yang secara terus menerus hingga selesai sampai data tersebut sudah jenuh, sedangkan dalam upaya memperkuat kepercayaan dan devaliditas di Penelitian ini yaitu dengan melakukan teknik triangulasi data. Triangulasi data adalah aktivitas check dan recheck lalu di csrosscheck antara data/materi bersama observasi penelitian yang telah dilakukan di lapangan, setelah itu akan di crosscheck dengan presepsi peneliti. Dalam penelitian ini lebih lengkapnya peneliti akan melakukan analisis yaitu menggambarkan dan menganalisa data sehingga dapat memberikan informasi serta dapat memberikan pemahaman terkait dengan pokok permasalahan secara rinci dan juga sistematis. Kemudian data yang diperoleh akan digambarkan menggunakan kata-kata ataupun kalimat sehingga didapat sebuah kesimpulan, data yang diperoleh merupakan data yang didapatkan melalui teknik wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya data tersebut akan dikaitkan dengan menggunakan dasar teori yang sudah ada. Adapun tahap-tahap teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi :

a. Reduksi Data

Reduksi data pada Penelitian ini yaitu menentukan beberapa hal pokok dengan fokus pada hal yang penting saja, setelah itu menganalisis, menggolongkan serta

mengarahkan penelitian pada indikator-indikator yang telah ditentukan sebelumnya, sehingga dapat mendukung dalam melakukan penelitian.

b. Penyajian Data

Tahap selanjutnya adalah penyajian data, data yang sudah disusun dan dikelompokkan adalah data-data yang diperoleh dari lapangan. Selanjutnya hasil data penelitian akan diolah dan disusun menjadi sebuah laporan secara sistematis serta terperinci agar dapat menggambarkan dan mendiskripsikan sesuai dengan kejadian ataupun fenomena yang telah terjadi sehingga lebih mudah untuk dipahami.

c. Kesimpulan atau Verifikasi

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan adalah temuan baru yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Pengambilan atau penarikan kesimpulan merupakan sebuah proses menganalisis serta menghubungkan informasi-informasi yang sudah terperinci untuk kemudian dijadikan sebuah kesimpulan dengan tetap mengacu pada pokok permasalahan penelitian. Dengan penarikan kesimpulan ini maka akan tercapai tujuan penelitian secara baik dan benar (Sugiyono, 2009)

